

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap terjadinya bencana.¹ Hal ini dapat terlihat melalui faktor geologis dan kondisi geografis wilayahnya. Secara geologis, wilayah Indonesia berada pada pertemuan ketiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut merupakan lempeng tektonik aktif yang saling bergerak dan saling berbenturan. Aktivitas tektonik antara ketiga lempeng tersebut menimbulkan terciptanya deretan gunung api (*volcanic arc*) yang terbentang di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Utara Sulawesi-Maluku hingga Papua.² Deretan gunung api yang membentang di wilayah Indonesia juga termasuk dalam deretan gunung api yang berada di Asia Pasifik, sehingga wilayah ini sering juga disebut sebagai *Ring of Fire* atau Cincin Api Pasifik. Pertemuan antara ketiga lempeng serta adanya wilayah-wilayah yang melalui *Ring of Fire* menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang rentan terhadap terjadinya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami.

Secara geografis, wilayah Indonesia membentang tepat di garis Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis dan berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang menyebabkan wilayah Indonesia menjadi rentan akan bencana banjir, tanah longsor,

¹ Ari Kurnia dkk, *Socialization Strategy of Disaster Mitigation About Flash Flood News In East Nusa Tenggara Province*, *Journal of Social Political Science*, Vol. 3 (2), (2022), Hlm. 188.

² BNPB, 2016, *Risiko Bencana Indonesia*, Hlm. 14

cuaca ekstrem, abrasi, hingga kekeringan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, berbagai permasalahan yang timbul seperti pemanasan global dan perubahan iklim secara global juga memberikan berbagai dampak terhadap wilayah Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan suhu yang semakin panas serta kondisi cuaca yang semakin tak menentu serta meningkatnya kejadian bencana. Kerentanan bencana di Indonesia juga dipengaruhi oleh permasalahan demografi penduduk, masalah antropogenik, serta permasalahan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kondisi geologis dan geografis wilayah Indonesia yang rentan akan berbagai bencana tentu memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini tentu membutuhkan penanganan yang tepat sehingga kerugian yang dialami dapat diminimalisir. Melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat, dengan jelas dinyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, pemerintah memiliki peran serta tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia, tidak terkecuali bencana. Dibutuhkan peraturan yang membahas secara khusus terkait dengan cara menanggulangi bencana secara sistematis, terkoordinasi, terpadu, dan tepat sasaran, serta kemampuan pelayanan publik yang berkualitas sehingga mampu untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia. Hal ini kemudian semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 telah menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.³ Hal ini tentu sangat dibutuhkan mengingat Indonesia merupakan negara yang seringkali terjadi bencana sehingga tentu perlu diatasi yang akan memberikan hasil yang ingin dicapai, yaitu meminimalisir terjadinya bencana. Berikut merupakan data yang menjabarkan dengan rinci mengenai bencana alam yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun belakangan.

Tabel 1. 1
Data Bencana Alam di Indonesia Selama 2019-2021

Jenis Bencana	2019	2020	2021
Puting Beliung	1.387	1.386	-
Karhutla	746	597	579
Banjir	784	1.518	1.794
Tanah Longsor	719	1.054	1.321

³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.

Kekeringan	123	26	15
Gempa Bumi	30	18	24
Gelombang Pasang dan Abrasi	18	43	91
Erupsi Gunung Api	7	7	1
Cuaca Ekstrem	-	-	1.577
Total	3.814	4.650	5.402

Sumber: *bnpb.go.id*

Melalui tabel di atas, maka diketahui bahwa jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir sangat banyak. Berdasarkan dengan jumlah bencana alam yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami 3.814 bencana dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4.650 bencana dan kembali meningkat menjadi 5.402 di tahun 2021. Dari berbagai macam bencana yang terjadi, dapat dilihat bahwa bencana banjir menjadi bencana yang mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2019, banjir yang terjadi di Indonesia sebanyak 784, lalu meningkat di 2020 menjadi 1.518, dan puncaknya pada tahun 2021 meningkat menjadi 1.794, menyebabkan banjir menjadi fenomena yang paling banyak terjadi.

Banjir merupakan bencana alam yang cukup mendominasi di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengemukakan banjir merupakan suatu keadaan yang wilayahnya digenangi oleh air hingga terendam karena peningkatan volume air.⁴ Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya banjir di Indonesia, seperti iklim yang ekstrem (turunnya hujan secara ekstrem), intensitas dan curah hujan yang berlebih, serta permukaan tanah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tinggi muka air laut. Selain itu, ada beberapa hal lainnya yang menjadikan suatu wilayah rawan terjadi banjir, seperti kurangnya sumber resapan air karena banyaknya pengalihfungsian lahan, penyalahgunaan lahan, pemanasan global, kerusakan tanggul/bendungan, hingga sikap masyarakat yang acuh tak acuh akan lingkungan dengan membuang sampah tidak pada tempatnya.

Permasalahan banjir terjadi di berbagai penjuru Indonesia, tak terkecuali di DKI Jakarta. Wilayah DKI Jakarta memiliki luas lahan sebesar 662,33 km, dengan 40% wilayahnya, atau sekitar 24.000 ha adalah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan laut, atau rata-rata sekitar 7 mdpl (meter di atas permukaan laut).⁵ Hampir setiap tahun, wilayah DKI Jakarta tak luput dari bencana banjir. Wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah yang menjadi pertemuan dan dilewati oleh tiga belas (13) sungai yang berada di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengalir ke Jakarta sehingga Jakarta mendapatkan limpahan air dari hulu dan bermuara di Teluk Jakarta. Kondisi natural ini menyebabkan wilayah DKI Jakarta berada dalam posisi dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir.

⁴ <https://bnpb.go.id/> diakses Sabtu, 18 Maret 2023.

⁵ Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2015.

Selain kondisi alamiah, terdapat beberapa faktor lainnya yang menyebabkan banjir di DKI Jakarta. Hal ini dapat terlihat ketika intensitas curah hujan lokal begitu tinggi yang berakibat saluran drainase dan sungai tak mampu menampung air hingga meluap. Lalu, curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang meliputi Depok, Bogor, Puncak, dan Cianjur, adanya banjir rob yang menyebabkan peningkatan tinggi muka air laut sehingga air tidak bisa terbang ke laut, kurangnya kepekaan masyarakat dalam hal membuang sampah sesuai pada tempatnya, dan perumahan yang berada di pinggiran wilayah sungai, serta kurangnya daerah resapan air sebagai tempat yang mampu menampung air saat hujan tiba.

Masalah banjir di wilayah DKI Jakarta sudah menjadi penyakit menahun sehingga menjadi isu yang serius bagi pemerintah. Dibutuhkan langkah dan penanganan yang tepat untuk meminimalisir terjadinya bencana banjir di DKI Jakarta dan kerugian yang dialami oleh masyarakat, mengingat banjir terus terjadi setiap tahunnya. Berikut merupakan data bencana banjir di wilayah DKI Jakarta selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 2
Data Banjir di DKI Jakarta

Wilayah	2019	2020	2021
Jakarta Timur	7 Kecamatan; 19 Kelurahan; 51 RW	10 Kecamatan; 62 Kelurahan; 339 RW;	10 Kecamatan; 32 Kelurahan; 97 RW

Jakarta Selatan	8 Kecamatan; 25 Kelurahan; 46 RW	10 Kecamatan; 58 Kelurahan; 222 RW;	10 Kecamatan; 44 Kelurahan; 110 RW
Jakarta Utara	6 Kecamatan; 19 Kelurahan; 51 RW	6 Kecamatan; 24 Kelurahan; 140 RW	6 Kecamatan; 15 Kelurahan; 29 RW
Jakarta Barat	7 Kecamatan 23 Kelurahan 90 RW	8 Kecamatan; 41 Kelurahan; 247 RW	5 Kecamatan; 21 Kelurahan; 58 RW
Jakarta Pusat	1 Kecamatan; 1 Kelurahan; 1 RW	8 Kecamatan; 26 Kelurahan; 83 RW	2 Kecamatan; 4 Kelurahan; 7 RW
Total Kejadian Banjir Pertahun	59	101	72

Sumber: bcbd.jakarta.go.id

Melalui data yang dijabarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari banyaknya fenomena bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi kota dengan tingkat terdampak banjir terbanyak, baik dari bagian kecamatan, kelurahan, hingga ke tingkat RW. Salah satu wilayah bagian Jakarta Selatan yang paling sering mengalami bencana banjir adalah Kecamatan Tebet.

Banjir yang terjadi di Kecamatan Tebet terjadi dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi, adanya banjir kiriman dari hulu, dan meluapnya air Sungai Ciliwung yang menjadi pembatas antara wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kecamatan Tebet merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung. Sehingga, begitu air permukaan sungai naik, maka tak dapat dipungkiri bahwa luapan air Sungai Ciliwung juga mengenai wilayah Kecamatan Tebet.

Kecamatan Tebet terdiri dari tujuh (7) kelurahan dan seringkali mengalami banjir. Pada tahun 2021, Kelurahan Kebon Baru dan Kelurahan Manggarai menjadi wilayah yang mengalami banjir. Berdasarkan dengan laporan Camat Kecamatan Tebet, Dyan Airlangga, ketinggian air paling tinggi mencapai 1,5 meter di daerah sekitaran Sungai Ciliwung.⁶ Kemudian, di Kelurahan Bukit Duri juga mengalami banjir yang mencapai sepinggang orang dewasa.⁷ Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Banjir di Kecamatan Tebet terjadi karena faktor kiriman air dari hulu yang menyebabkan meluapnya air di Sungai Ciliwung. Adanya permasalahan tersebut membuat berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan bencana banjir yang terjadi, salah satunya dengan program normalisasi sungai. Di salah satu wilayah Kelurahan Bukit Duri, terdapat rumah warga yang berbatasan dengan Sungai Ciliwung yang dibatasi dengan beton, akan tetapi air yang meluap masih menyebabkan terjadinya banjir.⁸

⁶Wahyu Adityo Prodjo, "4 RW di Tebet Terendam Banjir, Ketinggian Air Hingga 1,5 Meter", Kompas.com, 8 Februari 2021.

⁷ Iqbal Nugroho, "Banjir Rendam 5 RW di Bukit Duri", Merdeka.com, 18 Februari 2021.

⁸ Nurika Manan, "Cerita 'Malam ke Subuh' Warga Bukit Duri Diterjang Banjir", CNN Indonesia.com, 03 Januari 2020.

Selain dengan normalisasi sungai, perangkat daerah terkait juga mengupayakan berbagai cara untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Hal ini dapat dilihat ketika banjir terjadi di sekitaran Kelurahan Kebon Baru, dilakukan upaya dengan menurunkan PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) untuk membersihkan sampah, menerjunkan Petugas Suku Dinas SDA Jakarta Selatan yang dibantu dengan pompa dari Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Tebet.⁹ Selain itu, dalam menghadapi kerentanan terjadinya banjir, Kecamatan Tebet juga bersiaga dengan melakukan koordinasi pengajuan bantuan kepada Dinas Sosial, menyiapkan evakuasi dengan damkar dan penanggulangan bencana, serta mempersiapkan lokasi-lokasi sebagai tempat pengungsian.¹⁰

Institusi utama dalam melakukan penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).¹¹ Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016 yang mengatur terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD merupakan bagian pemerintah yang melaksanakan tugas ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dalam subbidang bencana.¹² Dibutuhkan peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi permasalahan ini melalui mitigasi bencana baik sebelum bencana, saat terjadi bencana, hingga setelah bencana. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian

⁹ Aldi Gultom, "6 RW di Kebon Baru Tebet Direndam Banjir, Petugas Gabungan Turun Tangan", Ayojakarta.com, 25 Februari 2020.

¹⁰ Peppy Ade Liana, "3 Kelurahan di Tebet Waspada Banjir, Camat Siagakan Petugas Hingga Tempat Pengungsian", Tribun Jakarta, 22 September 2020.

¹¹ Triana Anggun, Roni Ekha Putera, dan Roza Liesmana, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan, *JKP (Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik)*, Vol. 1 (2), (2020), Hlm. 124.

¹² Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016.

dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir. Oleh karena itu, untuk mengatasi banjir yang melanda kawasan Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dibutuhkan strategi yang tepat sasaran.

Fenomena bencana banjir berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bencana banjir dapat menghambat banyak kegiatan masyarakat, menimbulkan kerugian baik dalam bentuk harta benda hingga kehilangan nyawa, dan timbulnya permasalahan kesehatan. Permasalahan banjir yang sangat kompleks ini tentu membutuhkan strategi penanggulangan yang jitu sehingga mampu untuk meminimalisir ancaman yang terjadi akibat banjir.

Masalah penanggulangan banjir di Kecamatan Tebet kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana strategi yang dilakukan dalam menanggulangi banjir Kecamatan Tebet. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membahas permasalahan yang ada dengan judul, “Strategi Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Strategi Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Tebet Kota Administratif Jakarta Selatan Tahun 2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi penanggulangan banjir di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta literatur ilmiah terkait dengan strategi penanganan bencana banjir di Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi BPBD DKI Jakarta dan Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam merumuskan kebijakan khususnya dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Tebet.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, peneliti memberikan gambaran dan uraian yang dibagi berdasarkan tiap bab. Untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian, peneliti menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang melatarbelakangi pokok permasalahan penelitian mengenai penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan. Melalui permasalahan yang ditulis pada latar belakang masalah, dirumuskan rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang dilakukan pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjabarkan mengenai penelitian-penelitian yang sudah ada yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Hal ini dibutuhkan dengan bertujuan menghindari pengulangan penelitian dan mencegah terjadinya plagiasi dari penelitian yang sudah ada. Selain penelitian terdahulu, terdapat kerangka teori yang menjelaskan konsep-konsep teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan kerangka pemikiran sebagai alur berpikir peneliti.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab III merupakan metodologi penelitian yang dimulai dari pendekatan penelitian yang digunakan, kemudian penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan lokasi penelitian sebagai tempat penelitian dilakukan serta jadwal penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan bab yang membahas hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti secara mendalam terhadap masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Bab ini mencakup gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

Bab ini membahas terkait kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang didapat dan telah dilakukan analisa.

